

Dewan: Ada Indikasi Mark Up

■ Pengadaan Obat di RSUD

MEMPAWAH, TRIBUN - Sekretaris Fraksi PDIP Susanto, menduga adanya ketidakberaan dalam pengadaan obat yang dilakukan pihak RSUD Rubini Mempawah, pada tahun anggaran 2010.

Dia memaparkan, pada 2010, pihak rumah sakit melakukan dua kali pengadaan obat-obatan, dengan nilai sekitar Rp 2,5 miliar. Pengadaan pertama Rp 1,9 miliar, yang dimenangkan PT Indo Marta, dan pengadaan yang kedua dengan nilai kontrak Rp 594 juta, dimenangkan PT Prima Christo Farm.

"Ternyata berdasarkan fakta yang ada, dari hasil bon pembayaran obat, pengiriman obat hanya dikirim oleh PT Prima Christo Fram. Sedangkan PT Indo Marta tak muncul. Dari bon penagihan ada indikasi penyimpangan. Kemana PT Indo Marta, sedangkan dia pemenang tender yang pertama dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar," kata Susanto kepada Tribun, Senin (8/8).

Indikasi penyimpangan kedua, lanjut Susanto, 273 jenis obat yang tidak sesuai harganya dari SK Menteri Kesehatan. "Ini jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK," kata Susanto.

Selain harga kontrak obat melebihi SK Menkes, ironis-

nya pengiriman obat hanya dikirim oleh PT Prima Christo Fram. Sedangkan PT Indo Marta tak muncul. Dari bon penagihan ada indikasi penyimpangan."

SUSANTO

Sekretaris Fraksi PDIP

ya lagi, dari per 31 Desember 2010, pihak rumah sakit Rubini mempunyai utang ke PT Prima Christo Farm, sebanyak 49 jenis obat dengan nominal harga Rp 90 juta.

"Semestinya, pihak rumah sakit masih ada penyimpanan sampai Maret 2011 dari pengadaan 2010. Dari pengiriman satu perusahaan tersebut, saya juga mencurigai ini ada permainan. Pengadaan obat rumah sakit Rubini Mempawah melanggar Kepres 80 tahun 2003, karena pemberlakuan Perpres 54 tahun 2010, baru dilaksanakan 2011," jelas Susanto lagi.

Legislator PDIP ini meminta bupati untuk menghentikan kerjasama dengan kedua PT tersebut. "Ini bukan pertama terjadi. Kalau dibiarkan, keuangan daerah akan dirugikan. Kita akan koordinasikan dengan kejaksaan, karena saya melihat ada indikasi mark up, dalam pengadaan obat ini," te-

gas Susanto.

Dihubungi terpisah, Kepala Seksi Penunjang Medis Rumah Sakit Rubini Mempawah, Denny Soesanto, menjelaskan, mengenai pengadaan obat-obatan sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari proses tender, hingga pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya.

"Memang sebelumnya pihak rumah sakit itu sudah berutang ke PT Prima Christo Farm. Karena Prima Christo Farm termasuk perusahaan kecil, dan kontraknya besar, jadi waktu tender dimenangkan oleh PT Indo Marta untuk pengadaan pertama, dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar," jelas Denny, kepada Tribun, di ruangannya, Senin (8/8).

Karena sebelumnya sudah berutang obat kepada PT Prima Christo Farm, maka penyaluran obatnya melalui PT Prima Christo Farm. Pada lelang kedua, diperubahan anggaran 2010 dengan alokasi Rp 594 juta, dimenangkan oleh PT Prima Christo Farm, sehingga dalam pembukuannya yang menyalurkan obat dan alat habis pakai lainnya PT Prima Christo Farm.

"Perlu diluruskan kembali, kedua PT ini sahamnya milik satu orang yang sama. Pihak rumah sakit tidak mempersoalkan, selama sesuai dengan spesifikasi obat yang ditenderkan dalam kontrak, dan mengenai harga sudah sesuai dengan SK Menteri Kesehatan," jelasnya Denny.

Dia menambahkan, terkait SK Menteri Kesehatan mengenai harga obat, tidak tetap setiap. Pada 2010 dan 2011, juga ada perbedaan. SK 2010 nomor 146, tentang harga obat generik, dan 2011 meteri kesehatan mengeluarkan SK nomor 633, tentang harga obat untuk pengadaan pemerintah 2011. (din)

Rugikan Masyarakat

DIREKTUR eksekutif Clean Governance (CG) Kabupaten Pontianak, Khairul, meminta pihak Kejaksaan Negeri Mempawah, menindak tegas setiap perbuatan yang melanggar hukum, terutama korupsi di wilayah Kabupaten Pontianak. Dia melihat, indikasi mark up, sama halnya dengan perbuatan korupsi.

"Kami dari lembaga anti korupsi, siap menggiring kasus ini sampai tuntas. Karena perbuatan korupsi, selain melanggar hukum, juga merugikan masyarakat banyak," kata Khairul, kepada Tribun, Senin (8/8).

Dia menambahkan, pihaknya siap mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Jika benar dalam pengada-

an obat-obatan rumah sakit menyalahi ketentuan, dan masyarakat dirugikan, itu tidak boleh dibiarkan berkembang di Kabupaten Pontianak," tegasnya.

Menurutnya, jika terdapat celah korupsi dalam pengadaan obat tersebut, harus ditindak tegas. "Kebutuhan obat, tidak hanya dibutuhkan masyarakat kecil, menengah ke atas pun membutuhkannya. Kalau harganya di mark up, dikhawatirkan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pihak kejaksaan harus segera menindaklanjuti. BPK merupakan lembaga audit resmi, dan hasil auditnya tidak diragukan," tambah Khairul. (din)